PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga Tim Penyusunan Rencana Strategis dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru lebih konkret

Banjarbaru, September 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru,

Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru	8
	2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru	21
	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru	27
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru	32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru	35
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih	39
	3.3 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel	41
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup (Analisis Lingkungan Strategis)	42
	3.5 Isu – Isu Strategis	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII	PENUTUP	67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah Kota Banjarbaru, keterkaitan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Misi Ke 1 (satu) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru sebagai salah satu lembaga teknis Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6), yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2013

tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dan Nomor 56 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarbaru.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru, disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026, yaitu " JUARA “ terdiri atas tiga Aspek Penting yaitu **MAJU** adalah Komitmen Untuk Menjadikan Banjarbaru Mempunyai Daya Saing Dengan Daerah Lainnya Melalui Pengembangan segala potensi. **AGAMIS** adalah Terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang agamis, berakhlak Mulia dan Berbudi Pekerti Luhur. **SEJAHTERA** adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
9. Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32).
11. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang serta sebagai tolak ukur Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru selama kurun waktu tahun 2021 - 2026. Maksud Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu; **BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih
3.3 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup (Analisis Lingkungan Strategis)
3.5 Isu – Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan. Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu dari Tabel Terlampir
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan. Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu dari Tabel Terlampir
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6), yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarbaru dan Nomor 56 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarbaru.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar struktur di bawah ini :

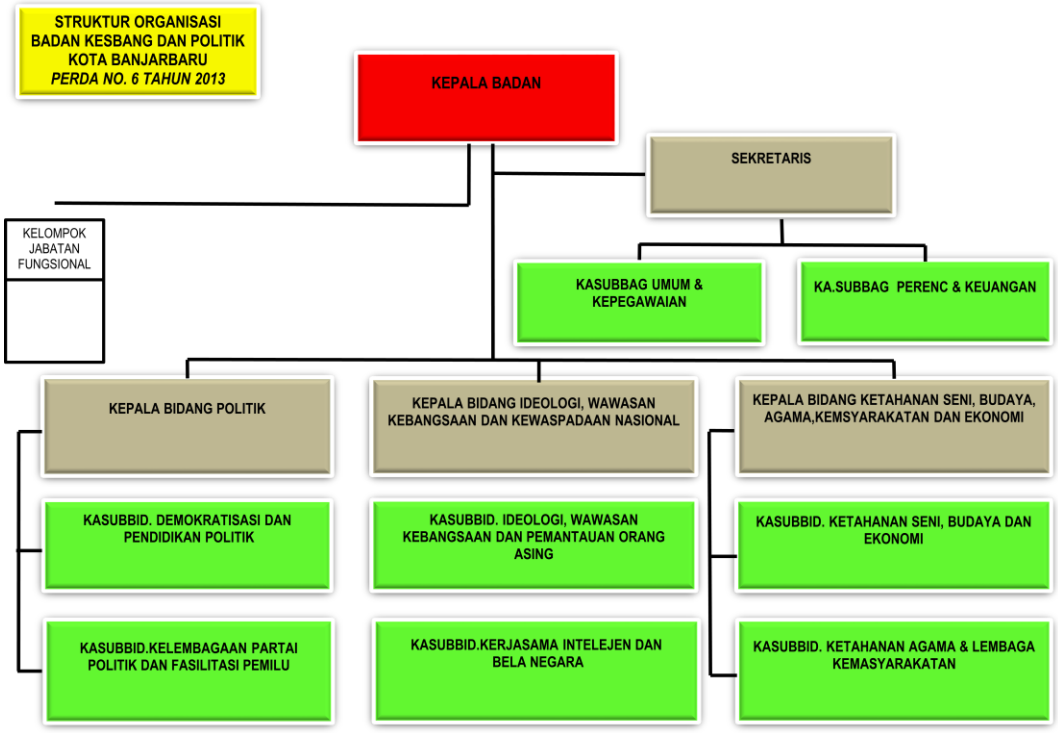

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 tahun 2013 Pasal 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai Tugas Pokok sebagaimana dijelaskan sebelumnya yakni Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sama dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis dibidang politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah pada bidang politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan

kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

c) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang politik dalam negeri.
d) perumusan kebijakan operasional, pembinaan pelaksanaan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
e) perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
f) pengelolaan kegiatan Kesekretariatan.

Sedangkan Unsur-unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a) Sekretariat
b) Bidang Politik
c) Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Kewaspadaan Nasional
d) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
e) Kelompok Jabatan Fungsional.
f) Unit Pelaksana Teknis

Pada Bab 2 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru di jelaskan sebagai berikut :

a) **Kepala Badan** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merumuskan dan menetapkan visi misi serta kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. menyelenggarakan, mengendalikan, memonitor, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan.
4. membina dan mengarahkan bawahan agar melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan baik dan efektif.
5. mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas sesuai petunjuk agar kegiatan tepat sasaran dan mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.
6. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil secara lisan dan tertulis untuk mencapai tujuan organisasi
7. menilai hasil kinerja bawahan secara tertulis sesuai juklak dan juknis untuk perkembangan karir pegawai, penghargaan dan sanksi

8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan padaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja dan program sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsan dan Politik sesuai pedoman dan program kerja tahun lalu untuk bahan kelancaran melaksanakan tugas.
2) Mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur, mengendalikan, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan dan tertulis tentang tugas dan kegiatan kepada Sub Bagian sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis.
3) Menghimpun dan menyusun segala hal yang berkaitan dengan laporan kepegawaian dan keuangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.
4) Memberikan saran telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5) Memberi petunjuk dan arahan serta menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai secara lisan dan tertulis untuk perbaikan kegiatan dan pengembangan karir pegawai dan masa yang akan datang dan pemberian penghargaan serta sanksi.

6) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan sesuai juklak dan juknis sebagai bentuk pertanggunjawaban tugas.
7) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas-tugas bawahan sesuai prosedur dan ketentuan agar kegiatan berjalan dengan efektif dan efesien.
8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/ memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/ tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/ promosi, absensi dan data kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekratariat Badan Kesatuan dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat kerangka acuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis.
3. Memberi petunjuk bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa,bagaimana dan hasil yang harus didapat agar produktivitas kerja bawahan optimal
4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Memberikan Penilaian terhadap kinerja dan pretasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karir dan pemberian penghargaan serta saksi.
6. Membuat konsep surat/naskah dinas berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan untuk diajukan kepada atasan.
7. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan diatas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep.
8. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya

10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang lebih lanjut
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

b) Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, dan melaporkan kegiatan administrasi perencanaan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengganaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian perencanaan dan Keuangan pada Sekratariat Badan Kesatuan dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat kerangka acuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara memberi disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis.
3. Memberi petunjuk bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa,bagaimana dan hasil yang harus didapat agar produktivitas kerja bawahan optimal

4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. Memberikan Penilaian terhadap kinerja dan pretasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karir dan pemberian penghargaan serta saksi.
6. Membuat konsep surat/naskah dinas berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan untuk diajukan kepada atasan.
7. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan diatas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep.
8. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang lebih lanjut

11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

c) **Kepala Bidang Politik** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat rencana program kerja tahunan Bidang Politik pada Badan Kesbang dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat konsep untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas-tugas bawahan secara lisan dan tertulis agar kegiatan pekerjaan terbagi habis.
3. memberikan saran dan telaahan kepada atasan baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan terhadap masalah/kegiatan yang dihadapi agar kegiatan berjalan dengan baik.
4. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan dan tertulis terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan agar hasil kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan hasil yang diharapkan.
5. menilai hasil kerja bawahan secara tertulis sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, pemberian penghargaan dan sanksi
6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang

permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih lanjut.
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

d) **Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat rencana program kerja tahunan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbang dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat konsep untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas-tugas bawahan secara lisan dan tertulis agar kegiatan pekerjaan terbagi habis.
3. memberikan saran dan telaahan kepada atasan baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan terhadap masalah/kegiatan yang dihadapi agar kegiatan berjalan dengan baik.
4. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan dan tertulis terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan agar hasil kegiatan berjalan

sesuai dengan ketentuan dan hasil yang diharapkan.

5. menilai hasil kerja bawahan secara tertulis sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, pemberian penghargaan dan sanksi
6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih lanjut.
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

e) **Kepala Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat rencana program kerja tahunan Bidang Ketahanan, Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesbang dan Politik dengan cara mempelajari program kerja tahun lalu sebagai perbandingan dan membuat konsep untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. mengkoordinasikan, mendistribusikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas-tugas

bawahan secara lisan dan tertulis agar kegiatan pekerjaan terbagi habis.

3. memberikan saran dan telaahan kepada atasan baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan terhadap masalah/kegiatan yang dihadapi agar kegiatan berjalan dengan baik.
4. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan baik secara lisan dan tertulis terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan agar hasil kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan hasil yang diharapkan
5. menilai hasil kerja bawahan secara tertulis sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku untuk pengembangan karir pegawai yang bersangkutan, pemberian penghargaan dan sanksi
6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur untuk memperoleh informasi tentang permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis serta berkala kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih lanjut.
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Unit Pelaksana Teknis

- Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana teknis operasional
- Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih unit Pelaksana Teknis
- Satu unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah Kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah
- Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksaana Teknis ditetapkan dengan peraturan Walikota.

2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

a. Sumber Daya Manusia (Ketenagaan)

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 berjumlah 34 orang terdiri 11 orang perempuan dan 23 orang laki. ASN perempuan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politk bependidkan SMU, S1 dan S2, selain ada sebagai staf pelaksana ada juga menduduki jabatan struktural, dengan rincian dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN		
NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	PNS	23 orang
2	Kontrak	11 orang
Jumlah		34 orang

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN		
LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
23 orang	11 orang	34 orang

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru berdasarkan tingkat golongan/ kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah PNS Menurut Tingkat Golongan/Kepangkatan

No.	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	I	1	
2.	II	5	
3.	III	12	
4.	IV	5	
	JUMLAH	23	

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Jumlah PNS Menurut Tingkat Jabatan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	ESELON IV	5	
2.	ESELON III	3	
3.	ESELON II	1	
4.	ESELON I	-	
5.	FUNGSIONAL	1	
6.	NON JAFUNG / ESELON	13	
	JUMLAH	23	

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dilihat berdasarkan Tingkat Diklat Perjenjangan adalah pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah PNS Menurut Tingkat Diklat Perjenjangan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SPALA/ADUM/PIM IV	6	
2.	SEPAMA/ADUMLA	-	
3.	SPADYA/ PIM III	3	
4.	SESPA/SPAMEN/PIM II	-	
5.	JLEMHANAS/SPATI/PIM I	-	
6.	JNON DIKLAT	14	
um	JUMLAH	23	

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dilihat berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal adalah pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SLTP	1	
2.	SLTA	6	
3.	D-3	2	
4.	S-1	9	
5.	S-2	5	
	JUMLAH	23	

b. Aset Yang Dikelola

Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru mempunyai sarana dan prasarana antara lain :

- Mobil operasional sebanyak 2 buah.
- Kendaraan roda 2 sebanyak 11 buah.
- Peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran kerja telah dilengkapi seperti meja, kursi, filling cabinet, komputer, laptop, lemari, TV dan lain-lain.
- Ruang kerja belum memadai, ruang tamu sekaligus dengan ruang kerja Kepala Badan dilengkapi dengan AC dan lain-lain, untuk memudahkan terjalinnya komunikasi antara pimpinan dan staf, pimpinan dengan mitra kerja.

Tabel 2.7
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG
1	Mobil	2	B
2	Sepeda Motor	11	B
3	komputer PC	19	B
4	PC Unit/ Komputer PC	1	RB
5	Lap Top	19	B
6	Printer	20	B
7	Printer	1	RB
8	Proyektor + Attachment / LCD	1	B
9	Proyektor + Attachment / LCD	1	RB
10	Overhead Projektor	1	B
11	Layar proyektor	1	B
12	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4	B
13	Mesin Absen (time recorder)	1	B
14	Lemari Besi	7	B
15	Rak Besi/Metal	3	B
16	Filling Besi/Metal	16	B
17	Lemari kayu	3	B
18	Lemari Kaca	1	B
19	Lemari buku pejabat Ess II	1	B
20	Brand Kas	1	
21	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	B
22	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	B
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	B

24	Meja Kerja	4	B
25	Meja Rapat	2	KB
26	Meja Komputer	3	B
27	Meja tamu ruang tunggu pejabat	1	B
28	Meja tamu ruang biasa	1	B
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	B
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	B
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	B
32	Kursi Tamu	2	B
33	Kursi Putar	14	B
34	Kursi rapat	31	B
35	Sofa	1	B
36	AC Unit	9	B
37	Kipas angin	4	B
38	Lemari Es	2	B
39	Dispenser	1	B
40	Dispenser	1	KB
41	Televisi	4	B
42	CCTV	4	B
43	Sound System	1	B
44	Megaphone	10	B
45	Camera Film	4	B
46	Camera Film	1	RB
47	Wireless	1	B
48	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	RB
49	Facsimile	2	B
50	Microphone/ wirless mic	1	B

52	Unit Transceiver SSB Portable	1	B
53	Tape recorder	1	B
54	Kompor Gas	1	KB
55	Radio	1	B
56	Mesin potong rumput	1	B
57	Tangga Alumunium	2	B
58	Mimbar/Podium	1	B
59	Gorden	30	B
60	Karpet	20	B
61	Tikar	1	B
62	Borgol	32	B
63	Map	3	B
64	Gambar walikota	1	B
65	Alat dapur lainnya	1	B

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Tingkat capaian kinerja perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru berdasarkan sasaran /target Renstra Perangkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

a. Pelayanan Internal
   1) Penyusunan program Badan;
   2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan
   3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
   4) Penyusunan laporan Badan;
   5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
   6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
   7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
   8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
   9) Pengelolaan kearsipan;
   10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
   11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
   12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal
   1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
   2) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
   3) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
   4) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
   5) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
   6) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan, Dalam keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Wewenang Gubernur/Bupati/Walikota hanya terbatas kepada menerima laporan keberadaan Kepengurusan dari ormas yang laporannya disertai dengan SKT yang diterbitkan oleh Mendagri. Surat

rekomendasi keberadaan ormas difasilitasi oleh Badan Kesabngpol. Dari data Ormas terlihat peran wanita dalam jabatan kepengurusan anggota keormasan. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia adalah ormas wanita (gender) yang bersifat sosial beralamat Jl A Yani Km 29,5 Ruko B No 2 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru.

7) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
8) Fasilitasi penyaluran bantuan dana hibah organisasi partai politik. Kouta 30 persen perempuan dalam aktivitas politik termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik harus turut diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya hingga dapat bersaing dengan laki-laki. Pendidikan Politik berperspektif gender diperlukan agar ke depan tidak ada lagi praktik mendiskreditkan politisi perempuan hanya karena status keperempuanan yang disandangnya.
9) Fasilitasi Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) .

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dapat dikategorikan baik. Pencapaian kinerja pelayanan periode 2016-2020 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelaayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Banjarbaru

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2016 -2020					Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2020					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Sasaran 1 : Meningkatnya kemampuan aparatur dan peran serta masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan potensi konflik																			
1	tidak terjadi konflik / menurunnya potensi konflik			0		0	0	0		0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi dan pendidikan politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan																			
1	tingkat partisipasi/ tingkat pemahaman masyarakat dalam kehidupan berpolitik			%	70	70	70	70	70		83,30	91,00	85,63	99,00		119,00	130,00	122,33	141,43
Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif organisasi kemasyarakat dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan agama.																			
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			%	100	100	100	100	100		84,46	113,33	100	100,00		84,46	113,33	100	100

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan pertahunnya. Pada tabel 2.9 pencapaian anggaran dan realisasi pendanaan tahun 2016 – 2020

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio(%) Antara realisasi dan Anggaran Tahun					Rata -Rata Pertunbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	**4.054.040.291**	**3.789.190.199**	**5.021.362.676**	**5.395.906.946**	**4.445.802.895**	**3.673.258.987**	**3.533.697.669**	**4.499.351.927**	**4.775.968.415**	**4.051.764.231**	**90,61**	**93,26**	**89,60**	**88,51**	**91,14**	**2%**	**2%**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.600.313.450	2.543.910.609	3.015.038.400	3.047.322.450	2.871.467.950	2.514.161.587	2.411.401.797	2.958.339.031	2.902.235.519	2.717.238.599	96,69	94,79	98,12	95,24	94,63	3%	2%
Belanja Pegawai	2.600.313.450	2.543.910.609	3.015.038.400	3.047.322.450	2.871.467.950	2.514.161.587	2.411.401.797	2.958.339.031	2.902.235.519	2.717.238.599	96,69	94,79	98,12	95,24	94,63	3%	2%
BELANJA LANGSUNG	1.453.726.841	1.245.279.590	2.006.324.276	2.348.584.496	1.574.334.945	1.159.097.400	1.122.295.872	1.541.012.896	1.873.732.896	1.334.525.632	79,73	90,12	76,81	79,78	84,77	2%	4%
Belanja Barang dan Jasa	1.371.826.841	1.200.779.590	1.974.524.276	1.974.524.276	1.341.513.445	1.078.047.400	1.079.935.872	1.509.612.896	1.509.612.896	1.112.275.632	78,58	89,94	76,45	76,45	82,91	-1%	1%
Belanja Modal	81.900.000	44.500.000	31.800.000	374.060.220	232.821.500	81.050.000	42.360.000	31.400.000	364.120.000	222.250.000	98,96	95,19	98,74	97,34	95,46	30%	29%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

1. Tantangan

   Tantangan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan semakin kompleks dan strategis terutama dikaitkan dengan dinamika masyarakat yang semakin berkembang. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditantang untuk berkerja lebih serius, agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan makna dan nilai tambah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan khususnya di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.

   Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melanjuntukan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

   a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Pembangunan Bidang Kesbangpol.
   b. Kurangnya pemahanan dan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
   c. Tingkat partisipasi masyarakat kurang dan belum mampu menalaah keberadaan Bakesbangpol.
   d. Kualitas pendidikan politik masyarakat masih rendah.
   e. Kurangnya rasa nasionalisme dan krisis kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa
   f. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.

2. Peluang

   Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dalam mencapai Visi dan Misinya adalah:

   a. Adanya kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui Ormas dan LSM
   b. Terbukanya kesempatan pembinaan Ormas, LSM, dan Partai Politik
   c. Dorongan kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis semakin luas

Selain tantang dan peluang pembangunan pelayanan yang telah diuraikan diatas, masih ada nilai-nilai luhur yang dapat merealisasikan Visi dan Misi Badan Kesbang dan Politik Kota Banjarbaru.

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh personal Badan Kesbang dan Politik Kota Banjarbaru, antara lain :

1. Kerjasama

   Artinya komitmen diantara seluruh Badan Kebang dan Politik Kota Banjarbaru sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi, ini berarti bahwa setiap personal Badan Kebang dan Politik Kota Banjarbaru harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bidangnya sendiri dengan mengorbankan tujuan bersama dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang harmonis antar bidang untuk mewujudkan Visi dan Misi.

2. Disiplin

   Artinya bahwa setiap personal Badan Kebang dan Politik Kota Banjarbaru harus memegang komitmen untuk mempunyai sikap dan perilaku mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku yaitu senantiasa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan patuh sesuai ketentuan dan nilai organisasi yang berlaku.

3. Tanggung Jawab

   Artinya bahwa didalam melaksanakan pekerjaan tugas setiap personal senantiasa dibarengi dengan rasa penuh tanggung jawab dengan kata lain sikap bersedia dan untuk menanggung akibat atas perilaku dan perbuatan yang dilakukannya.

4. Pengabdian

   Artinya sebagaimana diketahui bahwa organisasi kita adalah merupakan unit pelayanan, mengandung arti bahwa setiap melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata didasarkan pengharapan imbalan materi, namun harus dibarengi dengan pengabdian atau rela berkorban tenaga, waktu dan biaya sekalipun.

5. Kesejahteraan

   Artinya kerjasama, disiplin pribadi, tanggung jawab dan pengabdian tidak akan mencapai hasil yang optimal bila tidak diikuti dengan pemahaman dan memperhatikan terhadap hak dan kewajiban masing-masing personal, oleh karena itu kesejahteraan merupakan hal yang penting dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Dengan mencermati kondisi dan situasi yang berkembang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas, peran dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan penanganan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan dan berkaiatan dengan misi ke 1 (lima) dalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia. Bertujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya. Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional saat ini sudah cukup memprihatinkan, ditandai dengan semakin memudarnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda yang jika berkelanjutan, dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke jurang kehancuran. Banyaknya kasus-kasus penyimpangan ideologi di Kota-kota besar turut mempengaruhi kondusifitas di Kota Banjarbaru. Menyikapi permasalahan ideologi tersebut, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) pada tingkat Kota Banjarbaru adalah amanat dari Undang-Undang :

1. Perlunya peningkatan wawasan kebangsaan untuk mengatasi pengaruh-pengaruh oleh pihak-pihak lain yang mengganggu stabilitas daerah dan peningkatan kecintaan terhadap simbol-simbol negara seperti Lambang Negara Bendera Merah Putih serta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2. Perlunya optimalisasi pendidikan politik masyarakat fasilitasi partai politik serta kelembagaan politik
3. Perlunya peningkatan pemantapan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di daerah
4. Perlunya peningkatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan fasilitasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan menjaga stabilitas penyelenggaraan Pembangunan di daerah
5. Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas penangganan konflik sosial secara terkoordinir dan terpadu dalam melaksanakan aksi daerah untuk kewaspadaan nasional dan daerah

Dari isu-isu diatas perlu kebijakan program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :
   a) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan sub kegiatan :
   a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
   b) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :
   a) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
   b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan sub kegiatan :
   a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
   b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :
   a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
   c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan Visi sebagai berikut :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA “

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut ;

MAJU Adalah Komitmen Untuk Menjadikan Banjarbaru Mempunyai Daya Saing Dengan Daerah Lainnya Melalui Pengembangan Segala Potensi.

AGAMIS adalah terwujudnya masyarakat banjarbaru yang agamis, berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur

SEJAHTERA Adalah Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Menumbuhkembangkan Ekonomi Daerah, Lingkungan Yang Sehat Dan Pemerintahan Yang Baik.

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, mengantisipasi tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi **“BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA “,** dirumuskan Misi Kota Banjarbaru yang ditetapkan dalam 3 (tiga) rumusan misi sebagai berikut:

Misi Pertama	:	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia
Misi Kedua	:	Meningkatkan Pembangunan Perekonomian daerah Yang berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Misi Ketiga	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, sebagai salah satu lembaga teknis pemerintah Kota Banjarbaru, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke satu Pemerintah Kota

Banjarbaru, yaitu : **"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia "**

Dari misi kesatu tersebut, pencapaian tujuan yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah **"Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat ",** dengan 5 (lima) sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatnya Partisipasi Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat
3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Meningkatnya Kewaspadaan, Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

3.3 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel

Dalam Renstra 2021-2026 Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi **"Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing"**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan Misi, sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, sehat, cerdas, dan terampil
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya
4. Memantapkan kondisi sosial budata daerah yang berbasiskan kearifan lokal
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional berorientasi pada pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain dari pada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/ kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan (strenghts/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (opportunities/O) dan ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis.

Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

- **Analisis Lingkungan Internal**
  1) STRENGTH (S)/KEKUATAN
     a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru memiliki visi dan misi yang jelas;
     b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013;
     c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 29 Tahun 2013;
     d) Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru cukup;
  2) WEAKNESSES (W)/KELEMAHAN
     a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip 'the right man in the right place' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
     b) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
     c) Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Banjarbaru belum optimal
     d) Keberadaan ormas belum terdatakan baik secara faktual maupun secara aktual.

- **Analisis Lingkungan Eksternal**

1) OPPORTUNITIES (O)/PELUANG
   a) Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
   b) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
   c) Kultur masyarakat Kota Banjarbaru yang religius dan bersifat gotong royong;
   d) Keberagaman suku dan budaya di Kota Banjarbaru;
2) THREATS (T)/ANCAMAN
   a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Kota Banjarbaru;
   b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
   c) Menurunnya rasa kebangsaan dan raca cinta tanah air di masyarakat;
   d) Adanya kepengurusan ganda dalam partai politik.

- **Strategi Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis**

  Berdasarkan SWOT Analysis terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :

  a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
  b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;
  c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada;
  d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru harus mewaspadai dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

3.5 Isu - Isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi

terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal.

Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi dengan mencermati situasi dan kondisi yang berkembang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas, peranan dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan penanganan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan dihadapkan juga kepada penentuan yang menjadi isu strategis yaitu **Masih Kurangnya Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian dan Pencegahan Potensi Konflik SARA guna Menjaga Kondusifitas Wilayah.**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksnakan Misi tersebut diatas, dan juga untuk memecah permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021- 2026 yaitu :

a) Tujuan

Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat.

b) Sasaran

1. Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat.
3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat.	Persentase pembinaan keagamaan, penyelesaian potensi konflik SARA dan pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	100
Sasaran 1 : Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik , Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat	Persentase peran partai politik dalam Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	100	100	100	100	100
Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	%	80	85	90	95	100	100

Sasaran 4 : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%	100	100	100	100	100	100
Sasaran 5 : Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial	Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Kota Banjarbaru dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru 5 (lima) tahun kedepan serta mengacu kepada tujuan dan sasaran dan Indikator Capaian pada misi ke satu kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian sasaran **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia**, maka strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan sekaligus di implementasikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/ kegiatan dalam periode 2016-2021, adalah sebagaimana tergambar pada tabel :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : BANJARBARU MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat.	Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Melaksanakan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ideologi, Wasbang & kewaspadaan Nasional

	Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik , Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat	Pelaksanaan pemantapan pendidikan politik pengembangan etika dan budaya politik masyarakat	Melaksanakan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di Bidang Politik
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan pemantapan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Melaksanakan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang Ketahanan Seni,budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Melaksanakan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang Ketahanan Seni,budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Melaksanakan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ideologi, Wasbang & kewaspadaan Nasional

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2021- 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-Program tersebut adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Adapun Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program pada tabel berikut :

MATRIK TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Internal Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**B**	**B**	**2.883.402.725**	**BB**	**3.033.657.849**	**BB**	**3.094.331.006**	**BB**	**3.156.217.626**	**A**	**3.219.341.979**	**A**	**3.283.728.818**	**sekretariat**
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100%**	**100%**	**595.885.772**	**100%**	**891.030.000**	**100%**	**997.319.120**	**100%**	**757.805.502**	**100%**	**769.561.612**	**100%**	**789.592.845**	
	Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD		100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	37.485.000	100%	38.234.700	100%	38.999.394	100%	39.779.382	
	Terlaksanya penyusunan perencanaan pembangunan SKPD	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.750.000	2 Dokumen	16.065.000	2 Dokumen	16.386.300	2 Dokumen	16.714.026	2 Dokumen	17.048.307	
	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan		2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	21.000.000	2 Dokumen	21.420.000	2 Dokumen	21.848.400	2 Dokumen	22.285.368	2 Dokumen	22.731.075	
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100%	2.848.402.725	100%	2.996.907.849	100%	3.056.846.006	100%	3.117.982.926	100%	3.180.342.585	100%	3.243.949.436	
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu		25 orang	2.813.402.725	25 Orang	2.929.927.849	25 Orang	2.988.526.406	25 Orang	3.048.296.934	25 Orang	3.109.262.873	25 Orang	3.171.448.130	
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	5.202.000	1 Laporan	5.306.040	1 Laporan	5.412.161	
	Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan		18 Laporan	30.000.000	20 Laporan	61.980.000	20 Laporan	63.219.600	20 Laporan	64.483.992	20 Laporan	65.773.672	20 Laporan	67.089.145	

Peningkatan pengelolaan administrasi Umum SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi		100%	303.091.772	100%	264.956.000	100%	320.255.120	100%	326.660.222	100%	333.193.427	100%	339.857.295	
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia		20 jenis	4.451.772	3 jenis	4.600.000	3 jenis	4.692.000	3 jenis	4.785.840	3 jenis	4.881.557	3 jenis	4.979.188	
Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia		1188 Buah	100.948.000	6 jenis	105.996.000	6 jenis	108.115.920	6 jenis	110.278.238	6 jenis	112.483.803	6 jenis	114.733.479	
Terlaksananya penyediaan pengadaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia		26500Lembar	14.747.750	26560 Lembar	15.500.000	26560 Lembar	15.810.000	26560 Lembar	16.126.200	26560 Lembar	16.448.724	26560 Lembar	16.777.698	
Terlaksananya penyediaan barang cetakan		Jumlah barang cetakan yang tersedia		3 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		
Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan atau Buku Peraturan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia		1133 Eks	4.860.000	1133 Eks	5.100.000	1133 Eks	5.202.000	1133 Eks	5.306.040	1133 Eks	5.412.161	1133 Eks	5.520.404	
Terlaksananya perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan		27 Laporan	178.084.250	27 Laporan	133.760.000	30 Laporan	186.435.200	30 Laporan	190.163.904	30 Laporan	193.967.182	30 Laporan	197.846.526	
Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan		100%	109.600.000	100%	434.324.000	100%	323.000.000	100%	70.000.000	100%	68.000.000	100%	74.000.000	
Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli		-	-	-	-	1 unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	
Terlaksananya pengadaan mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli		14 buah	37.600.000	-	-	4 Buah	14.000.000	1 Buah	6.000.000	-	-	12 Buah	24.000.000	
Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		1 set/ 4 buah	72.000.000	8 Buah	68.000.000	9 Buah	59.000.000	8 Buah/ 2 Unit	64.000.000	6 Buah/ 1 Unit	68.000.000	6 Buah	50.000.000	
Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbangun		-	-	2 paket	356.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun		-	-	1 Paket	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

Peningkatan fasilitasi penggunaan jasa pihak ketiga	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi		100%	43.200.000	100%	44.400.000	100%	127.584.000	100%	130.135.680	100%	132.738.394	100%	135.393.161	
Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainya yang dapat digunakan		1 Jenis	24.000.000	1 Jenis	25.200.000	1 Jenis	108.000.000	1 Jenis	110.160.000	1 Jenis	112.363.200	1 Jenis	114.610.464	
Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN dan jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor lainnya		2 Orang	19.200.000	2 Orang	19.200.000	2 Orang	19.584.000	2 Orang	19.975.680	2 Orang	20.375.194	2 Orang	20.782.697	
Peningkatan penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		100%	139.994.000	100%	147.350.000	100%	226.480.000	100%	231.009.600	100%	235.629.792	100%	240.342.388	
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		1 Unit	41.980.000	1 Unit	44.000.000	1 Unit	44.880.000	1 Unit	45.777.600	1 Unit	46.693.152	1 Unit	47.627.015	
Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara		12 Unit	76.194.000	12 Unit	80.000.000	12 Unit	81.600.000	12 Unit	83.232.000	12 Unit	84.896.640	12 Unit	86.594.573	
Terlaksananya pemeliharaan mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		20 Unit	2.000.000	20 Unit	2.500.000	30 Unit	10.000.000	30 Unit	10.200.000	30 Unit	10.404.000	30 Unit	10.612.080	
Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		20 Unit	13.320.000	30 Unit	20.850.000	40 unit	70.000.000	40 unit	71.400.000	40 unit	72.828.000	40 unit	74.284.560	
Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara		1 Paket	6.500.000	-	-	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.400.000	2 Paket	20.808.000	2 Paket	21.224.160	

Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	**Meningkatnya penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Potensi Paham Radikal yang diselesaikan**	**100%**	**100%**	**2.729.561.250**	**100%**	**3.223.403.500**	**100%**	**3.258.208.750**	**100%**	**797.013.925**	**100%**	**828.357.526**	**100%**	**861.868.330**	**Subbid Ideologi, Wasbang, Kewaspadaan Dini & POA**
	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	2.729.561.250	100%	3.223.403.500	100%	3.258.208.750	100%	797.013.925	100%	828.357.526	100%	861.868.330	
	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 dokumen	35.000.000	3 dokumen	45.000.000	3 dokumen	45.900.000	3 dokumen	46.818.000	3 dokumen	47.754.360	3 dokumen	48.709.447	

	Terlaksananya sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta dana hibah SPN Polda KalSel	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		3 kali	165.761.250	4 kali	105.000.000	4 kali	107.100.000	4 kali	109.242.000	4 kali	111.426.840	4 kali	113.655.376,80	
			Terlaksananya Pemberian Dana Hibah Rekrutmen Bintara POLRI POLDA KALIMANTAN SELATAN		1 kali	2.468.800.000	1 kali	2.490.551.000	1 Kali	2.490.551.000	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan		-	-	5 kali	80.000.000	5 kali	96.000.000	5 kali	105.600.000	5 kali	116.160.000	5 kali	127.776.000,00	
			Jumlah Pembinaan pada V eteran dan Janda V eteran		-	-	101 Orang	50.000.000	101 Orang	55.000.000	101 Orang	60.500.000	101 Orang	66.550.000	101 Orang	73.205.000,00	
			Jumlah penerima Santunan T ali Asih		-	-	3500 Orang	21.852.500	3500 Orang	24.037.750	3500 Orang	26.441.525	3500 Orang	29.085.678	3500 Orang	31.994.245,25	
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Revolusi mental		1 kali	35.000.000	12 kali	341.000.000	12 kali	347.820.000	12 kali	354.776.400	12 kali	361.871.928	12 kali	369.109.367	
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah monitoring dan evaluasi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Revolusi mental		18 kali	25.000.000	60 kali	90.000.000	60 kali	91.800.000	60 kali	93.636.000	60 kali	95.508.720	60 kali	97.418.894	

Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	**Meningkatnya partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik , Pengembangan Etika Serta Budaya Politik masyarakat**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**		**100%**	**1.288.749.619**	**100%**	**2.054.818.000**	**100%**	**2.063.813.200**	**100%**	**2.072.988.304**	**100%**	**2.082.346.910**	**100%**	**2.091.892.688**	**Bidang Politik**
	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Pendidikan Politik, pengembangan Etika dan Budaya Politik masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peran Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik dengan Anggaran Melebihi 50% dari Bantuan Hibah yang diberikan Pemerintah		100%	1.288.749.619	100%	2.054.818.000	100%	2.063.813.200	100%	2.072.988.304	100%	2.082.346.910	100%	2.091.892.688	
	Terlaksananya sosialisasi penyelengaraan Pendidikan Politik pengembangan Etika dan Budaya Politik masyarakat serta dana hibah partai politik	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi pendidikan politik		2 kali	53.856.000	7 kali	270.000.000	7 kali	275.400.000	7 kali	280.908.000	7 kali	286.526.160	7 kali	292.256.683	
			Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan hibah		9 Parpol	1.201.156.619	9 Parpol	1.605.058.000	9 Parpol	1.605.058.000	9 Parpol	1.605.058.000	9 Parpol	1.605.058.000	9 Parpol	1.605.058.000	
	Terlaksananya Koordinasi pendidikan politik	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah koordinasi pendidikan politik		1 kali	7.261.500	8 kali	104.520.000	8 kali	106.610.400	8 kali	108.742.608	8 kali	110.917.460	8 kali	113.135.809	
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi partai politik dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi situasi politik		2 kali	26.475.500	6 kali	75.240.000	6 kali	76.744.800	6 kali	78.279.696	6 kali	79.845.290	6 kali	81.442.196	

Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	**Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas yang Aktif**		**80%**	**40.700.000**	**85%**	**171.680.000**	**90%**	**175.113.600**	**95%**	**178.615.872**	**100%**	**182.188.189**	**100%**	**185.831.953**	**Subbid.Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi**
	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan		100%	40.700.000	100%	171.680.000	100%	175.113.600	100%	178.615.872	100%	182.188.189	100%	185.831.953	
	Terlaksananya sosialisasi keormasan	Pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah sosialisasi keormasan		-	-	3 kali	90.000.000	3 kali	91.800.000	3 kali	93.636.000	3 kali	95.508.720	3 kali	97418894,4	
	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi keormasan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi keormasan		40 kali	40.700.000	40 kali	81.680.000	40 kali	83.313.600	40 kali	84.979.872	40 kali	86.679.469	40 kali	88.413.059	

Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	**Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Persentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100%**	**100%**	**374.002.500**	**100%**	**433.080.000**	**100%**	**441.741.600**	**100%**	**450.576.432**	**100%**	**459.587.961**	**100%**	**468.779.720**	**Subbid.Ketahanan Agama dan Lembaga Kemasyarakatan**
	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Instansi yang bekerjasama dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (FKUB dan P4GN)		100%	374.002.500	100%	433.080.000	100%	441.741.600	100%	450.576.432	100%	459.587.961	100%	468.779.720	
	Terlaksananya sosialisasi P4GN dan FKUB	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah sosialisasi P4GN dan FKUB		-	-	4 kali	90.000.000	4 kali	91.800.000	4 kali	93.636.000	4 kali	95.508.720	4 kali	97.418.894	
	Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah koordinasi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		10 kali	374.002.500	15 kali	343.080.000	15 kali	349.941.600	15 kali	356.940.432	15 kali	364.079.241	15 kali	371.360.825	

Meningkatkan Toleransi Beragama, Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	**Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani**	**100%**	**100%**	**230.000.000**	**100%**	**1.020.000.000**	**100%**	**1.040.400.000**	**100%**	**1.061.208.000**	**100%**	**1.082.432.160**	**100%**	**1.104.080.803**	**Subbid. Kerjasama Intelijen & Bela Negara**
	Meningkatnya pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi		100%	230.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.040.400.000	100%	1.061.208.000	100%	1.082.432.160	100%	1.104.080.803	
	Terlaksananya sosialisasi/ bimtek Kewaspadaan Dini	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah sosialisasi/ bimtek kewaspadaan		-	-	1 kali	35.000.000	1 kali	35.700.000	1 kali	36.414.000	1 kali	37.142.280	1 kali	37.885.126	
	Terlaksananya Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Banjarbaru, Penanganan Konflik Sosial dan FKDM	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini Pemerintah Kota Banjarbaru , Penanganan Konflik Sosial dan FKDM		10 kali	230.000.000	18 kali	920.000.000	18 kali	938.400.000	18 kali	957.168.000	18 kali	976.311.360	18 kali	995.837.587	
	Terlaksanaya Monitoring Evaluasi Kewaspadaan Dini	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring dan evaluasi kewaspadaan dini		-	-	24 Kali	65.000.000	24 Kali	66.300.000	24 Kali	67.626.000	24 Kali	68.978.520	24 Kali	70.358.090	
						8.142.301.866		**10.827.669.349**		**11.070.927.276**		**8.474.425.661**		**8.623.816.337**		**8.785.775.158**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Kota Banjarbaru. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru dengan Misi Pemerintahan Kota Banjarbaru difokuskan pada Misi ke satu yaitu "***Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia***".

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan penguatan dan pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan partisipasi peran partai politik dalam pendidikan politik, Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Masyarakat	Persentase potensi paham radikal yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase fasilitasi / pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik Ipolek sosbud Hankam yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Banjarbaru

Sasaran Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan SKPD	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan pengelolaan administrasi Umum SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan fasilitasi penggunaan jasa pihak ketig	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Pendidikan Politik, pengembangan Etika dan Budaya Politik masyaraka	Persentase Peran Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik dengan Anggaran Melebihi 50% dari Bantuan Hibah yang diberikan Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Instansi yang bekerjasama dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (FKUB dan P4GN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021 - 2026), yang dalam penyusunannya memperhatikan pada RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan mengacu RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026, serta memperhatikan tugas dan fungsi dan sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru, yang setiap tahunnya akan dijabarkan menjadi rencana kerja mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru menjadi acuan dalam evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan adanya dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru akan sangat membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru untuk melihat sejauh mana capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro sehingga kemungkinan adanya perubahan-perubahan tidak bisa diprediksi sebelumnya sangat mungkin berpengaruh terhadap kondisi daerah.

Oleh karena itu dimungkinkan juga adanya perubahan terhadap Renstra SKPD. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarbaru,

Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650908 198702 1 002